

## BAB VII

### PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Bandung Tahun 2018, dalam konteks tatanan manajemen pemerintahan daerah merupakan pengaktualisasian prinsip konsepsi pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan suatu siklus dari proses komitmen dan *political will* dari Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk mengaktualisasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjembatani terciptanya sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah antar *stakeholder* terkait guna mewujudkan *Good Local Governance* dan secara yuridis formil didasarkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 27 ayat (2) tentang Pemerintah Daerah serta pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Berdasarkan kerangka pemahaman tersebut, Pemerintah Daerah Kota Bandung yang telah melaksanakan program dan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun 2018 wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah melalui Gubernur Jawa Barat dalam kerangka mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2018 dan pada gilirannya akan memberikan *feedback* secara simultan dan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung pada tahun-tahun berikutnya.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), pada hakekatnya merupakan wujud nyata adanya hubungan antara penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan secara aplikatif menjadi wahana dan sarana bagi Pemerintah untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung pada Tahun 2018. Dan pada gilirannya dapat meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, dalam kerangka mengoptimalkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung tersebut, kami sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh komponen penyelenggara pemerintahan dan masyarakat Kota Bandung mulai dari proses perumusan, penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mengoptimalkan dan mendayagunakan seluruh potensi sumber daya yang ada dalam upaya mewujudkan masyarakat Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis.